DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2020 (*Audited*)

Menjadi Instansi Pelaksana Pelayanan Publik Terbaik, Akurat dan Terintegrasi dalam Bidang Administrasi Kependudukan

kependudukancapil.jakarta.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

KATA PENGANTAR iv

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Sistematika Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 4

BAB II PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA 6

2.1. Visi dan Misi 6

2.2. Tujuan 8

2.3. Sasaran 8

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja 10

BAB III IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 11

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 11

3.2. Hambatan dan Kendala 13

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 14

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 14

4.2. Basis Akuntansi 14

4.3. Basis Pengukuran 14

4.4. Kebijakan Akuntansi 15

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 26

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 26

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 30

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 38

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca 45

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN 57

6.1. Gambaran Umum 57

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi 57

6.3. Struktur Organisasi 60

BAB VII PENUTUP 63

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan . Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Gabungan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 9 Juni 2021

Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI DKI JAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Gabungan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 9 Juni 2021

Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

20601000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER - AUDITED 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER - AUDITED 2020	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah - LO	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-Lain PAD Yang Sah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	**14,417,797,471.00**	**7,684,757,586.00**	6,733,039,885.00	87.62
Pendapatan Hibah - LO	14,417,797,471.00	7,684,757,586.00	6,733,039,885.00	87.62
Pendapatan Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Sumbangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	**14,417,797,471.00**	**7,684,757,586.00**	**6,733,039,885.00**	**53.30**
BEBAN				
BEBAN OPERASI	**279,958,559,774.00**	**336,728,593,846.00**	(56,770,034,072.00)	(16.86)
Beban Pegawai	129,354,345,704.00	178,007,317,773.00	(48,652,972,069.00)	(27.33)
Beban Persediaan	62,072,836,211.00	65,870,063,664.00	(3,797,227,453.00)	(5.76)
Beban Barang	554,094,652.00	4,218,043,408.00	(3,663,948,756.00)	(86.86)
Beban Jasa	70,155,798,147.00	70,109,710,527.00	46,087,620.00	0.07
Beban Pemeliharaan	2,321,007,745.00	3,935,867,518.00	(1,614,859,773.00)	(41.03)
Beban Perjalanan	0.00	26,850,000.00	(26,850,000.00)	(100.00)
BEBAN BUNGA	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN HIBAH	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN BANTUAN SOSIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15,500,477,315.00	14,560,740,956.00	939,736,359.00	6.45
BEBAN LAIN-LAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN RUGI SELISIH KURS	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN TRANSFER	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN	**279,958,559,774.00**	**336,728,593,846.00**	**(56,770,034,072.00)**	**120.28**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	**(265,540,762,303.00)**	**(329,043,836,260.00)**	**63,503,073,957.00**	**(19.30)**
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
BEBAN LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

20601000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER - AUDITED 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER - AUDITED 2020	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
SURPLUS / DEFISIT - LO	(265,540,762,303.00)	(329,043,836,260.00)	63,503,073,957.00	(19.30)

Jakarta, 09 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER - AUDITED 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	**0.00**	**0.00**	0.00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah - LRA	0.00	0.00	0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	0.00	0.00	0.00
Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	**0.00**	**0.00**	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan - LRA	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah - LRA	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	**0.00**	**0.00**	0.00
Pendapatan Hibah - LRA	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Dana Darurat - LRA	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Sumbangan - LRA	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BELANJA			
BELANJA OPERASI	**259,345,380,533.00**	**235,051,568,252.00**	90.63
BELANJA PEGAWAI	129,839,131,196.00	110,692,645,381.00	85.25
BELANJA BARANG DAN JASA	129,506,249,337.00	124,358,922,871.00	96.03
BELANJA MODAL	**6,420,793,115.00**	**6,205,176,604.00**	96.64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,420,793,115.00	6,205,176,604.00	96.64
BELANJA TIDAK TERDUGA	**0.00**	**0.00**	0.00
JUMLAH BELANJA	**265,766,173,648.00**	**241,256,744,856.00**	**90.78**
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**0.00**	**0.00**	0.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**0.00**	**0.00**	0.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	0.00	0.00	0.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH TRANSFER	**0.00**	**0.00**	**0.00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**265,766,173,648.00**	**241,256,744,856.00**	**90.78**
SURPLUS / (DEFISIT)	**(265,766,173,648.00)**	**(241,256,744,856.00)**	**90.78**
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**0.00**	**0.00**	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**0.00**	**0.00**	0.00
PEMBIAYAAN NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	**(265,766,173,648.00)**	**(241,256,744,856.00)**	**90.78**

Jakarta, 09 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2019 dan 2018		(196,564,809,433.00)	(165,044,007,913.00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		353,003,623,770.00	291,617,499,929.00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0.00	0.00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2020		156,438,814,337.00	126,573,492,016.00
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2019 dan 2018		353,003,623,770.00	291,617,499,929.00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(353,003,623,770.00)	(291,617,499,929.00)
RK PPKD per 1 Januari 2020		0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS AWAL		**156,438,814,337.00**	**126,573,492,016.00**
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(265,540,762,303.00)	(329,043,836,260.00)
Mutasi RK PPKD		241,296,594,925.00	353,003,623,770.00
Koreksi Ekuitas		(130,324,934.00)	5,905,534,811.00
Jumlah Perubahan Ekuitas		**(24,374,492,312.00)**	**29,865,322,321.00**
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(109,232,272,900.00)	(196,564,809,433.00)
RK PPKD		241,296,594,925.00	353,003,623,770.00
EKUITAS AKHIR		**132,064,322,025.00**	**156,438,814,337.00**

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Budi Awaluddin
NIP. 197801171997111001

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas		**0.00**	**0.00**
Kas di Bendahara Pengeluaran		**0.00**	**0.00**
Sisa Uang Persediaan		0.00	0.00
Sisa Belanja UP/GU		0.00	0.00
Kas Tunai		0.00	0.00
Kas di Bank		0.00	0.00
Uang Panjar		0.00	0.00
Sisa Belanja LS		0.00	0.00
Sisa Belanja TU		0.00	0.00
Kas Tunai		0.00	0.00
Kas di Bank		0.00	0.00
Uang Panjar		0.00	0.00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPN di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor		0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka		**229,612,897.00**	**83,081,256.00**
Beban Barang Dibayar Dimuka		186,370,412.00	83,081,256.00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		43,242,485.00	0.00
Persediaan		**44,813,569,740.00**	**41,277,568,001.00**
Persediaan Bahan Pakai Habis		35,588,131,509.00	21,372,220,003.00
Persediaan Bahan/Material		564,413,528.00	530,810,968.00
Persediaan Barang Lainnya		8,661,024,703.00	19,374,537,030.00
Jumlah Aset Lancar		**45,043,182,637.00**	**41,360,649,257.00**
ASET TETAP			
Tanah		65,349,077,000.00	65,349,077,000.00
Peralatan dan Mesin		126,712,833,336.00	126,264,880,754.00
Gedung dan Bangunan		28,175,982,306.00	28,175,982,306.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya		13,085,050.00	62,553,050.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		**(124,044,213,076.00)**	**(109,496,167,858.00)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(99,978,089,820.00)	(86,067,445,611.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(24,066,123,256.00)	(23,381,784,247.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0.00	(46,938,000.00)
Jumlah Aset Tetap		**96,206,764,616.00**	**110,356,325,252.00**
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		**6,296,250,004.00**	**217,250,000.00**
Aset Tidak Berwujud Lainnya		6,296,250,004.00	217,250,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		**(1,433,050,000.00)**	**(217,250,000.00)**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		(1,433,050,000.00)	(217,250,000.00)
Aset Lain-lain		**9,389,972,893.00**	**9,389,972,893.00**
Aset Tetap - Rusak Berat		9,375,292,125.00	9,375,292,125.00
Aset Tetap - Belum Validasi		0.00	0.00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0.00	0.00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		14,680,768.00	14,680,768.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		**(4,668,133,065.00)**	**(4,668,133,065.00)**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat		(4,658,957,585.00)	(4,658,957,585.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Pinjam Pakai		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(9,175,480.00)	(9,175,480.00)
Jumlah Aset Lainnya		**9,585,039,832.00**	**4,721,839,828.00**
JUMLAH ASET		**150,834,987,085.00**	**156,438,814,337.00**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		**0.00**	**0.00**
Utang PPh Pusat		**0.00**	**0.00**
Utang PPh 21		0.00	0.00
Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 22		0.00	0.00
Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 23		0.00	0.00
Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 26		0.00	0.00
Utang PPh 26 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPN Pusat		**0.00**	**0.00**
Utang PPN di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang Belanja		**18,770,665,060.00**	**0.00**
Utang Belanja SKPD		**18,770,665,060.00**	**0.00**
Utang Belanja Pegawai		18,661,700,323.00	0.00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		**108,964,737.00**	**0.00**
Utang Belanja Persediaan		0.00	0.00
Utang Belanja Barang		0.00	0.00
Utang Belanja Jasa		108,964,737.00	0.00
Utang Belanja Jasa Non TALI		0.00	0.00
Utang Belanja TALI		108,964,737.00	0.00
Utang Belanja Pemeliharaan		0.00	0.00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0.00	0.00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Belanja Modal SKPD		**0.00**	**0.00**
Utang Belanja Modal Tanah		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**18,770,665,060.00**	**0.00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**18,770,665,060.00**	**0.00**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
EKUITAS - LO		**(109,232,272,900.00)**	**156,438,814,337.00**
RK PPKD		**241,296,594,925.00**	**0.00**
RK PPKD Kas		241,256,744,856.00	0.00
RK PPKD Non Kas		39,850,069.00	0.00
JUMLAH EKUITAS		**132,064,322,025.00**	**156,438,814,337.00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**150,834,987,085.00**	**156,438,814,337.00**

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

Catatan atas Laporan Keuangan Gabungan

Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2020 (*Audited*)

BAB I: PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa dan/atau pengawas, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dasar Hukum

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
15. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;

23. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan APBD DKI Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
30. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

DKI Jakarta.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah.

SIPKD dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Visi dan Misi

BAB II: PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 pada waktu kampanye menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan *bottom up* dan *top down*, maka visi provinsi DKI Jakarta 2017-2022 adalah:

"JAKARTA KOTA MAJU, LESTARI, DAN BERBUDAYA YANG WARGANYA TERLIBAT DALAM MEWUJUDKAN KEBERADABAN, KEADILAN, DAN KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengaapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah.

Adapun misi RPJMD DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratisd dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

"MENJADIKAN JAKARTA TEMPAT WAHANANA APARTUR YANG BERKARYA, MENGABDI, MELAYANI SERTA MENYELESAIKAN BERBAGAI PERMASALAHAN KOTA DAN WARGA, SECARA EFEKTIF, MERITOKRATIS DAN BERINTEGRITAS"

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakn administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas.

Penyelenggaraan administras kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Gubernur DKI Jakarta, mengingat sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah penduduk DKI Jakarta yang harus ditunjangng dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tabel 2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
3	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratisd dan berintegritas	Terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM	Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas
		Budaya kerja yang masih lemah	Tersedianya anggaran APBD
		Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi	Adanya dukungan dan komitmen pimpinan
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Adanya UU tentang Administrasi Kependudukan
			Adanya sasaran dan prasaranan yang cukup memadai

Tujuan

2.2. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Terwujudnya tertib dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Terwujudnya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan;

c. Terwujudnya database administrasi kependudukan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah dan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik;

d. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan; dan

e. Terwujudnya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Sasaran

2.3. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran dari tujuan pertama: ”Terwujudnya tertib dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan” adalah:

a.1. Meningkatnya ketertiban pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang dapat diukur melalui prosentase regulasi/ kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah dibuat.

a.2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan, yang dapat diukur melalui prosentase akuntabilitas kinerja dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Sasaran dari tujuan kedua: "Terwujudnya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan" adalah

b.1. Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui:

- Prosentase penerbitan kartu keluarga;
- Prosentase penerbitan kartu tanda penduduk;
- Prosentase penerbitan kutipan akta kelahiran;
- Prosentase penerbitan kutipan akta kematian.

b.2. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional dinas, yang dapat diukur melalui persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional Dinas.

c. Sasaran dari tujuan ketiga : "Terwujudnya database administrasi kependudukan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah dan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik" adalah:

c.1. Meningkatnya akurasi database administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui prosentase penduduk yang telah terdata.

c.2. Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan, yang dapat diukur melalui: Prosentase pemanfaatan data kependudukan oleh instansi terkait kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk.

d. Sasaran dari tujuan keempat : "Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan" adalah:

d.1. Meningkatnya peran serta masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui prosentase kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan.

d.2. Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.

e. Sasaran dari tujuan kelima : "Terwujudnya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan"adalah: Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme pegawai, yang dapat diukur melalui: Prosentase kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator Pencapaian Target Kinerja

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target	Realisasi
1.	Memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	49.50%	75.70%	85.96%
2.	Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Dukcapil	62.00%	86.00%	96.90%
3.	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Jumlah instansi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	22.00%	60.00%	98.33%

BAB III: IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan Gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Gabungan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar **Rp. 265.766.173.648**.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0**.

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 241.256.744.856** atau mencapai **90,78%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 265.766.173.648.**

2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. **Pendapatan-LO** untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 14.417.797.471**, sedangkan jumlah **Beban** adalah sebesar **Rp. 279.958.559.774**, sehingga terdapat **Defisit dari Kegiatan Operasional** sebesar **Rp. 265.540.762.303**.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. **Ekuitas** pada tanggal **1 Januari 2020** adalah sebesar **Rp. 156.438.814.337 dikurangi Defisit-LO** sebesar **Rp. 265.540.762.303 ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD)** sebesar **Rp. 241.296.594.925** dan **ditambah Koreksi Ekuitas** sebesar **Rp. 130.324.934**, sehingga **Ekuitas** pada tanggal **31 Desember 2020** adalah sebesar **Rp. 132.064.322.025**.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai **Aset** per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 150.834.987.085**, yang terdiri dari **Aset Lancar** sebesar **Rp. 45.043.182.637**, **Aset Tetap** sebesar **Rp. 96.206.764.616** dan **Aset Lainnya** sebesar **Rp. 9.585.039.832**.

Nilai **Kewajiban** dan **Ekuitas** masing-masing sebesar **Rp. 18.770.665.060** dan **Rp. 132.064.322.025**.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Hambatan dan Kendala

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2020 adalah beberapa kegiatan kurang dan/atau tidak dapat direalisasikan dikarenakan harus dilakukannya Rasionalisasi Anggaran sesuai SE Sekda Nomor 46 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

BAB IV: KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurut pada ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Basis Akuntansi

4.2. Basis Akuntansi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi

yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Akuntansi

4.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan akuntansi pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan-LRA dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b.) Pendapatan Transfer; dan c.) Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat: a.) diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); b.) diterima oleh SKPD; dan c.) diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Akuntansi pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas.

Belanja

2. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
  - Ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
  - Organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
  - Fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belanja diakui pada saat: a.) Terjadinya pengeluaran pada RKUD; dan b.) apabila melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU), pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (Surat Pertanggungjawaban atau SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.

- Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah, dan diukur berdasarkan azas bruto.
- Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
  - Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan;
  - Perolehan barang tersebut untuk digunakan bukan untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
  - Nilai Rupiah pembelian barang memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap, sebagaimana penjelasan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin, terdiri atas:**	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	750.000
	- Alat-Alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	**Gedung dan Bangunan, terdiri atas:**	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: a.) Belanja Operasi; b.) Belanja Modal; c.) Belanja Tak Terduga; dan d.) Transfer, serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO

3. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO; b.) Pendapatan Transfer-LO; c.) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO; d.) Surplus Non Operasional-LO; dan e.) Pendapatan Luar Biasa-LO.
- Pendapatan-LO diakui pada saat: a.) timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan b.) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan-LO secara umum dicatat: a.) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan b.) sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- Beban diakui pada saat: a.) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; b.) Terjadinya konsumsi aset; dan

c.) Timbulnya kewajiban.

- Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.
- Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
- Beban Jasa, Barang, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA/PPK.
- Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
- Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Mapping Belanja ke Beban adalah sebagai berikut:

LRA (Permendagri Nomor 13 Tahun 2016)		Laporan Operasional	
No. Akun	Uraian	No. Akun	Uraian
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.1.05	Beban Pemeliharaan
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.1.03	Beban Barang
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.1.03	Beban Barang
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.1.05	Beban Pemeliharaan
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.27	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	9.1.04	Beban Jasa

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- **Aset Lancar**
  - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
  - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode akuntansi dan disajikan sebesar:
    - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap

- **Aset Tetap**
  - Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
  - Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar, yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin,** terdiri atas:	
2	Alat-alat berat	10.000.000
2.2	Alat-alat angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	750.000
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang

Milik Daerah (BMD) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

- **Penyusutan Aset Tetap**
  - Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
  - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
    - Tanah;
    - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
    - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
  - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  - Masa Manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan masa mendatang dilakukan penyesuaian.

- Tabel Masa Manfaat Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**Tanah**	**Tidak Disusutkan**
2	**Peralatan dan Mesin, terdiri atas :**	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian / Perternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	5
	- Alat-alat Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	**Gedung dan Bangunan, terdiri atas :**	
3.1	- Bangunan Gedung	20
3.2	- Bangunan Monumen	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :**	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air / Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas :**	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak	5
5.4	Hewan / Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Tidak Disusutkan
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	
5.5	Aset Tetap Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**Tidak Disusutkan**

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
  - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V: PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan – LRA

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode yang bersangkutan. Pendapatan LRA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 A "Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya", maka sejak Tahun 2015 tidak ada lagi pendapatan yang diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Belanja
Rp. 241.256.744.856

B. Belanja

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari satuan kerja , perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance Based Budgeting*) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daearh.

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 241.256.744.856** atau mencapai **90,78%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 265.766.173.648**. Rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	129.839.131.196	110.692.645.381	85,25%
Belanja Barang dan Jasa	129.506.249.337	124.358.922.871	96,03%
Belanja Modal	6.420.793.115	6.205.176.604	96,64%
Jumlah Belanja	**265.766.173.648**	**241.256.744.856**	**90,78%**

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 mengalami **Penurunan** sebesar **31,66 persen** dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Uraian	REALISASI		%
	TA 2020	TA 2019	
Belanja Pegawai	110.692.645.381	178.007.317.773	-37,82%
Belanja Barang dan Jasa	124.358.922.871	138.722.194.206	-10,35%
Belanja Modal	6.205.176.604	36.279.617.079	-82,90%
Jumlah Belanja	**241.256.744.856**	**353.009.129.058**	**-31,66%**

Belanja Pegawai
Rp. 110.692.645.381

B.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 110.692.645.381** dan **Rp. 178.007.317.773**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. **Seluruh anggaran Belanja Pegawai dipusatkan pada entitas Dinas**. Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 mengalami **Penurunan** sebesar **37,82 persen** dari Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penurunan signifikan pada pos Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDOL Pejabat) karena pada bulan April sampai dengan bulan November 2020 tidak dibayarkan/dihapuskan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam rangka penanganan Covid

Disease 2019 (Covid-19)

2. Adanya penurunan signifikan pada pos Tunjangan Kinerja karena pada bulan April s.d November 2020 Para ASN Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 Pasal 2 dan Pasal 3 dimana pada periode tersebut ASN DKI Jakarta hanya menerima Tunjangan Kinerja sebesar 50% sedangkan 25% Penundaan dari Tunjangan Kinerja akan dibayarkan pada APBD Tahun 2021

Uraian	REALISASI		%
	TA 2020	TA 2019	
Gaji Pokok	21.728.142.900	21.962.640.380	-1,07%
Tunjangan Keluarga	1.965.870.952	1.950.790.604	0,77%
Tunjangan Jabatan	807.410.000	846.720.000	-4,64%
Tunjangan Umum	884.575.000	868.405.000	1,86%
Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja	8.632.295.554	18.988.297.232	-54,54%
Tunjangan Beras	1.016.631.960	987.591.540	2,94%
Pembulatan Gaji	230.454	291.518	-20,95%
Tunjangan Kinerja	74.336.292.421	127.980.738.522	-41,92%
Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDOL Pejabat)	1.321.925.000	4.159.225.000	-68,22%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	264.533.857	-100,00%
Lain-lain	-	(1.915.880)	-100,00%
Jumlah Belanja Pegawai	**110.693.374.241**	**178.009.233.653**	**-37,82%**

Belanja Barang dan Jasa
Rp. 124.358.922.871

B.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 124.358.922.871** dan **Rp. 138.722.194.206**. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 mengalami **Penurunan** sebesar **10,35 persen** dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan oleh beberapa pos belanja mengalami penurunan karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2020 dan dialihkan untuk anggaran penanganan COVID 19.

Uraian	REALISASI		%
	Gabungan (TA 2020)	Gabungan (TA 2019)	
Belanja Bahan Pakai Habis	47.721.717.816	44.393.247.926	7,50%
Belanja Bahan/Material	428.219.734	950.486.386	-54,95%
Belanja Jasa Kantor	67.274.040.649	65.075.036.327	3,38%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.481.103	546.589.238	-90,22%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.343.042.923	14.921.378.428	-84,30%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	346.790.000	-100,00%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	73.612.500	111.772.001	-34,14%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.093.171.690	2.192.602.199	-4,53%
Belanja Makanan dan Minuman	461.214.652	2.969.694.118	-84,47%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	259.549.400	190.543.100	36,22%
Belanja Pakaian Kerja	632.754.762	909.034.500	-30,39%
Belanja Perjalanan Dinas	-	26.850.000	-100,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	194.557.946	-100,00%
Belanja Pemeliharaan	2.239.047.642	3.510.102.037	-36,21%
Belanja Jasa Konsultansi	-	47.400.000	-100,00%
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	779.070.000	2.336.110.000	-66,65%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**124.358.922.871**	**138.722.194.206**	**-10,35%**

Belanja Modal
Rp. 6.205.176.604

B.3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 6.205.176.604** dan **Rp. 36.279.617.079**. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 mengalami **Penurunan** sebesar **82,90 persen** dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan oleh beberapa pos belanja mengalami penurunan karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2020 dan dialihkan untuk anggaran penanganan COVID 19.

Uraian	Tahun Anggaran 2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	0,00%
Belanja Peralatan dan Mesin	6.420.793.115	6.205.176.604	96,64%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	**6.420.793.115**	**6.205.176.604**	**96,64%**

Uraian	REALISASI		%
	TA 2020	TA 2019	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	296.081.050	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	95.772.600	2.391.092.799	-95,99%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.109.404.004	31.180.925.030	-80,41%
Belanja Modal Pengadaan Meubelair	-	1.095.016.500	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan Penghiasan Ruangan Rumah Tangga	-	49.390.000	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/ Rumah Tangga	-	1.056.000	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	-	1.179.636.300	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	-	82.349.400	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	1.540.000	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	-	2.530.000	-100,00%
Jumlah Belanja	**6.205.176.604**	**36.279.617.079**	**-82,90%**

Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalm pendapatan – LO, Beban – LO dan penyajian disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual (*Full Acrual Accounting Cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca Mempunyai Keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan - LO
Rp. 14.417.797.471

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Jumlah Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 14.417.797.471** dan **Rp. 7.684.757.586**. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Blanko KTP Elektronik dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2020	TA 2019	%
Pendapatan Hibah - LO	14.417.797.471	7.684.757.586	87,62%
Jumlah Pendapatan	**14.417.797.471**	**7.684.757.586**	**87,62%**

Beban - LO
Rp. 279.958.559.774

5.2.2. Beban - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 279.958.559.774** dan **Rp. 336.728.593.846**.

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2020	TA 2019	%
Beban Pegawai	129.354.345.704	178.007.317.773	-27,33%
Beban Persediaan	62.072.836.211	65.870.063.664	-5,76%
Beban Barang	554.094.652	4.218.043.408	-86,86%
Beban Jasa	70.155.798.147	70.109.710.527	0,07%
Beban Pemeliharaan	2.321.007.745	3.935.867.518	-41,03%
Beban Perjalanan Dinas	-	26.850.000	-100,00%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.500.477.315	14.560.740.956	6,45%
Jumlah Beban	**279.958.559.774**	**336.728.593.846**	**-16,86%**

Beban Pegawai
Rp. 129.354.345.704

C.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 129.354.345.704** dan **Rp. 178.007.317.773**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja LRA per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Nilai Beban per 31 Desember 2020
Beban Pegawai	110.692.645.381	18.661.700.323	-	129.354.345.704
Utang Belanja Pegawai		18.661.700.323		

Beban Persediaan
Rp. 62.072.836.211

C.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 62.072.836.211** dan **Rp. 65.870.063.664**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja LRA per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Nilai Beban per 31 Desember 2020
Beban Persediaan	**51.292.404.635**	**87.752.312.495**	**76.971.880.919**	**62.072.836.211**
Saldo Persediaan per 31 Desember 2019		41.277.568.001		
Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan		1.925.000		
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain		31.971.940.767		
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta		14.417.797.471		
Belanja Persediaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019		83.081.256		
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain			31.971.940.767	
Belanja Persediaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020			186.370.412	
Saldo Persediaan per 31 Desember 2020			44.813.569.740	

1. Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

SKPD	Persediaan per 31 Desember 2020 (Rp.)	Persediaan per 31 Desember 2019 (Rp.)
Dinas Dukcapil	6.873.608.998	34.088.064.579
UPTIK	598.844.703	584.162.343
UPAK	63.391.750	73.752.300
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	4.831.333.956	1.850.695.616
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	5.805.468.537	1.029.905.303
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	8.778.761.084	1.484.156.443
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	7.932.335.193	1.091.703.688
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	9.651.225.123	919.449.230
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	278.600.396	155.678.499
Jumlah Persediaan	**44.813.569.740**	**41.277.568.001**

2. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan

Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 1.925.000** berada pada entitas UPTIK berupa Persediaan yang direklasifikasikan menjadi Persediaan Suku Cadang. Reklasifikasi dilakukan pada beberapa *item* Belanja Modal yang tidak memiliki biaya pemeliharaan dan tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

3. Transfer Persediaan Antar Entitas

Transfer persediaan antar entitas berupa Tonner, Blanko, Buku Register dll, dengan rincian Transfer Persediaan Antar Entitas SKPD pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain

SKPD	Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain (Rp.)
Dinas Dukcapil	112.052.600
UPTIK	61.006.500
UPAK	274.712.022
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	5.543.224.590
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	4.174.336.085
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	6.201.017.385
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	4.966.308.265
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	10.510.624.720
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	128.658.600
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	**31.971.940.767**

b. Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain

SKPD	Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain (Rp.)
Dinas Dukcapil	31.859.888.167
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	112.052.600
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	**31.971.940.767**

4. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta

Donasi/hibah persediaan yaitu berupa blangko KTP Elektronik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian didistribusikan ke Suku Dinas Kabupaten/Kota Administrasi sebagai entitas pelaksana langsung perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP Elektronik kepada masyarakat DKI Jakarta. Untuk Tahun 2020, nilai Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar **Rp. 14.417.797.471**.

Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Blangko KTP Elektronik	1.363.901	10.571	14.417.797.471
Jumlah Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta			**14.417.797.471**

5. Belanja Persediaan Dibayar di Muka

Belanja Persediaan Dibayar di Muka pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 186.370.412** merupakan sisa saldo Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2020. Pada Neraca, jumlah ini juga muncul sebagai **Beban Barang Dibayar Dimuka**. Rincian Belanja Persediaan Dibayar di Muka pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD	Belanja Persediaan Dibayar Dimuka (Rp.)
Dinas Dukcapil	7.047.926
UPTIK	25.150.082
UPAK	-
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	32.105.769
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	39.801.893
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	11.600.599
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	33.600.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	37.064.143
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	-
Jumlah Persediaan	**186.370.412**

6. Persediaan Yang Tidak Digunakan (Usang/Rusak Berat)

Persediaan Yang Tidak Digunakan (Usang/Rusak Berat) pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 14.895.351.398**. Nilai Persediaan yang telah usang ataupun rusak berat tidak disajikan di Neraca, melainkan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian Persediaan Usang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

SKPD	Persediaan Usang (Rp.)
Dinas Dukcapil	13.719.046.806
UPTIK	-
UPAK	38.997.475
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	121.671.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	232.253.430
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	397.237.500
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	226.509.965
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	147.267.230
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	12.367.992
Jumlah Persediaan Usang	**14.895.351.398**

Beban Barang
Rp. 554.094.652

C.3. Beban Barang

Jumlah Beban Barang pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 554.094.652** dan **Rp. 4.218.043.408**. Beban Barang merupakan konsumsi atas barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja LRA per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Nilai Beban per 31 Desember 2020
Beban Barang	**554.094.652**	**-**	**-**	**554.094.652**

Beban Jasa
Rp. 70.155.798.147

C.4. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 70.155.798.147** dan **Rp. 70.109.710.527**. Beban Jasa merupakan konsumsi atas jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja LRA per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Nilai Beban per 31 Desember 2020
Beban Jasa	**70.219.894.839**	**108.964.737**	**173.061.429**	**70.155.798.147**
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2020		108.964.737		
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2019			129.818.944	
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020			43.242.485	

1. Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2020

Rincian Utang Belanja Jasa per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD	Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2020 (Rp.)
Dinas	58.217.332
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	11.490.590
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	21.669.617
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	17.587.198
Jumlah Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2020	**108.964.737**

2. Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2019

Rincian Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2019 **Rp. 129.818.944** adalah sebagai berikut :

SKPD	Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2019 (Rp.)
Dinas	70.995.805
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	13.897.664
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	24.005.271
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	20.920.204
Jumlah Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2019	**129.818.944**

3. Belanja Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020

Belanja Jasa Dibayar Dimuka pada 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 43.242.485** merupakan sisa saldo Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada Neraca, Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan penyesuaian (relaksasi) iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99% mulai Agustus 2020 s.d 31 Januari 2021. sehingga terdapat Sisa Saldo atas Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar **Rp. 43.242.485** per 31 Dessember 2020 jumlah ini juga muncul sebagai **Beban Jasa Dibayar Dimuka**. Rincian Belanja Jasa Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut :

SKPD	Belanja Jasa Dibayar Dimuka (Rp.)
DINAS	2.616.114
UPTIK	221.684
UPAK	405.266
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	7.317.717
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	8.172.056
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	1.990.249
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	10.388.985
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	10.762.223
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	1.368.191
Jumlah Belanja Jasa Dibayar Dimuka	**43.242.485**

Beban Pemeliharaan Rp. 2.321.007.745

C.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah **Rp. 2.321.007.745** dan **Rp. 3.935.867.518**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja LRA per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Nilai Beban per 31 Desember 2020
Beban Pemeliharaan	**2.292.528.745**	**28.479.000**		**2.321.007.745**
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan		28.479.000		

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 28.479.000** dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
UPTIK			
SPAREPART PRINTER FARGO : RTD KAPTON	3	1.600.500	4.801.500
SPAREPART PRINTER FARGO ETHERNET BOARD	3	4.537.500	13.612.500
SPAREPART PRINTER FARGO : ROLLER HEATER	5	2.013.000	10.065.000
Jumlah Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan			**28.479.000**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 15.500.477.315

C.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah **Rp. 15.500.477.315** dan **Rp. 14.560.740.956**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2020 (Rp.)
Peralatan dan Mesin	13.600.338.305
Gedung dan Bangunan	684.339.010
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Beban Penyusutan	**14.284.677.315**
Aset Tidak Berwujud	1.215.800.000
Beban Amortisasi	**1.215.800.000**
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**15.500.477.315**

Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan yang menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Dinas Dukcapil. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna

laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan. Nilai ekuitas akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 **Rp. 132.064.322.025** Dan Tahun 2019 **Rp. 156.438.814.337** Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
EKUITAS AWAL		
Ekuitas - LO		
Ekuitas - LO per 31 Desember 2018 dan 2017	(196.564.809.433)	(165.044.007.913)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	353.003.623.770	291.617.499.929
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	-	-
Ekuitas - LO per 1 Januari 2019 dan 2018	**156.438.814.337**	**126.573.492.016**
RK PPKD		
RK PPKD per 31 Desember 2018 dan 2017	353.003.623.770	291.617.499.929
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(353.003.623.770)	(291.617.499.929)
RK PPKD per 1 Januari 2019 dan 2018	-	-
JUMLAH EKUITAS AWAL	**156.438.814.337**	**126.573.492.016**
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	(265.540.762.303)	(329.043.836.260)
Mutasi RK PPKD	241.296.594.925	353.003.623.770
Koreksi Ekuitas	(130.324.934)	5.905.534.811
Jumlah Perubahan Ekuitas	**(24.374.492.312)**	**29.865.322.321**
Ekuitas Akhir		
Ekuitas - LO	(109.232.272.900)	(196.564.809.433)
RK PPKD	241.296.594.925	353.003.623.770
EKUITAS AKHIR	**132.064.322.025**	**156.438.814.337**

Ekuitas Awal
Rp. 156.438.814.337

D.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah **Rp. 156.438.814.337** dan **Rp. 126.573.492.016**. Ekuitas Awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp. 265.540.762.303)

D.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **(Rp. 265.540.762.303)** dan **(Rp. 329.043.836.260)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Rincian Surplus/(Defisit) LO pada Tahun Anggaran 2020 adalah

sebagai berikut:

Uraian	TA 2020	TA 2019	%
Jumlah Pendapatan	14.417.797.471	7.684.757.586	**87,62%**
Jumlah Beban	(279.958.559.774)	(336.728.593.846)	**-16,86%**
Surplus/ (Defisit) Kegiatan Operasional	**(265.540.762.303)**	**(329.043.836.260)**	**-19,30%**
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	0.00%
Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**-**	**-**	**0.00%**
Pos Luar Biasa	-	-	0.00%
Surplus/ (Defisit) LO	**(265.540.762.303)**	**(329.043.836.260)**	**-19,30%**

Mutasi R/K PPKD
Rp. 241.296.594.925

D.3. Mutasi R/K PPKD

Jumlah Mutasi R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp. 241.296.594.925** dan **Rp. 353.003.623.770**.

Rincian Mutasi R/K PPKD pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Penambahan	Pengurangan	Nilai
R/K PPKD per 1 Januari 2020	-	-	-
R/K PPKD - Kas:	**241.256.744.856**		241.256.744.856
Realisasi Belanja pr 31 Desember 2020	241.256.744.856		
R/K PPKD - Non Kas:	**32.409.858.821**	**32.370.008.752**	**39.850.069**
Transfer Masuk Aset dari SKPD Lain	380.065.554		
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	31.971.940.767		
Akumulasi Penyusutan Aset transfer Keluar ke SKPD Lain	57.852.500		
Transfer Keluar Aset ke SKPD Lain		61.265.000	
Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Masuk dari SKPD Lain		336.802.985	
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain		31.971.940.767	
R/K PPKD per 31 Desember 2020			**241.296.594.925**

1. Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2020	Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 (Rp.)	%
Dinas Dukcapil	143.284.163.381	123.793.237.934	86,40%
UPTIK	10.148.465.030	9.359.080.336	92,22%
UPAK	670.775.930	662.882.853	98,82%
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	17.351.040.757	15.626.829.940	90,06%
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	18.465.673.432	18.209.808.191	98,61%
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	23.511.371.236	23.365.624.091	99,38%
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	24.639.773.571	24.468.957.259	99,31%
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	26.463.045.144	24.607.061.038	92,99%
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	1.231.865.167	1.163.263.214	94,43%
Jumlah Realisasi Belanja	**265.766.173.648**	**241.256.744.856**	**90,78%**

2. Transfer Masuk Aset Tetap dari SKPD Lain

Rincian Transfer Masuk Aset Tetap dari SKPD Lain per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan(Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Pengirim
DINAS					
Sumersibel Pump	2015	1	10.340.000	10.340.000	Sudin Dukcapil Jakarta Barat
Pick Up	2013	1	318.800.554	318.800.554	Badan Pengelola Aset Daerah
Kursi Biasa / Karyawan	2004	50	472.500	23.625.000	Sudin Dukcapil Jakarta Barat
JUMLAH				**352.765.554**	
UPTIK					
Sepeda Motor	2013	2	13.650.000	27.300.000	Dinas Dukcapil
JUMLAH				**27.300.000**	
Jumlah Transfer Masuk Aset dari SKPD Lain per 31 Desember 2020				**380.065.554**	

3. Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Masuk dari SKPD Lain

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Transfer Masuk dari SKPD Lain per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Akumulasi Penyusutasn (Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Pengirim
DINAS					
Sumersibel Pump	2015	1	10.340.000	10.340.000	Sudin Dukcapil Jakarta Barat
Pick Up	2013	1	278.950.485	278.950.485	Badan Pengelola Aset Daerah
Kursi Biasa / Karyawan	2004	50	472.500	23.625.000	Sudin Dukcapil Jakarta Barat
JUMLAH				**312.915.485**	
UPTIK					
Sepeda Motor	2013	2	11.943.750	23.887.500	Dinas Dukcapil
JUMLAH				**23.887.500**	

4. Transfer Keluar Aset ke SKPD Lain

Rincian Transfer Keluar Aset ke SKPD Lain pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan(Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Penerima
DINAS					
Sepeda Motor	2013	2	13.650.000	27.300.000	UPTIK
JUMLAH				**27.300.000**	
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat					
Sumersibel Pump	2015	1	10.340.000	10.340.000	Dinas Dukcapil
Kursi Biasa / Karyawan	2004	50	472.500	23.625.000	Dinas Dukcapil
JUMLAH				**33.965.000**	
Jumlah Transfer Keluar Aset ke SKPD Lain per 31 Desember 2020				**61.265.000**	

5. Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Keluar ke SKPD Lain

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Transfer Keluar ke SKPD Lain per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Penerima
DINAS					
Sepeda Motor	2013	2	11.943.750	23.887.500	UPTIK
JUMLAH				**23.887.500**	
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat					
Sumersibel Pump	2015	1	10.340.000	10.340.000	Dinas Dukcapil
Kursi Biasa / Karyawan	2004	50	472.500	23.625.000	Dinas Dukcapil
JUMLAH				**33.965.000**	
Jumlah Transfer Keluar Aset ke SKPD Lain per 31 Desember 2020				**57.852.500**	

6. Transfer Persediaan Antar Entitas

Transfer persediaan antar entitas berupa Tonner, Blanko, Buku Register dll, dengan rincian Transfer Persediaan Antar Entitas SKPD pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain

SKPD	Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain (Rp.)
Dinas Dukcapil	112.052.600
UPTIK	61.006.500
UPAK	274.712.022
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	5.543.224.590
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	4.174.336.085
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	6.201.017.385
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	4.966.308.265
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	10.510.624.720
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	128.658.600
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	**31.971.940.767**

b. Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain

SKPD	Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain (Rp.)
Dinas Dukcapil	31.859.888.167
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	112.052.600
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	**31.971.940.767**

Koreksi Ekuitas (Rp. 130.324.934)

D.4. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (**Rp. 130.324.934)** dan **Rp. 5.905.534.811**. Koreksi Ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya.

Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp.)
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya / Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	11
Reklasifikasi Aset dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	16.088.572
Jumlah Koreksi Penambahan	**16.088.583**
Reklasifikasi Aset dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	16.088.572
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	506.001
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2019	129.818.944
Jumlah Koreksi Pengurangan	**146.413.517**
Jumlah Koreksi Ekuitas	**(130.324.934)**

Ekuitas Akhir

Rp. 132.064.322.025

D.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp. 132.064.322.025** dan **Rp. 156.438.814.337**. Ekuitas Akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Rincian perhitungan Ekuitas Akhir pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2020	TA 2019
Ekuitas Awal	**156.438.814.337**	**126.573.492.016**
Perubahan Ekuitas		
Surplus/Defisit LO	(265.540.762.303)	(329.043.836.260)
Mutasi RK PPKD	241.296.594.925	353.003.623.770
Koreksi Ekuitas	(130.324.934)	5.905.534.811
Jumlah Perubahan Ekuitas	**(24.374.492.312)**	**29.865.322.321**
Ekuitas Akhir	**132.064.322.025**	**156.438.814.337**

Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu. Secara umum, ringkasan Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)	%
Aset			
Aset Lancar	45.043.182.637	41.360.649.257	8,90%
Aset Tetap	220.250.977.692	219.852.493.110	0,18%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(124.044.213.076)	(109.496.167.858)	13,29%
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	6.296.250.004	217.250.000	2798,16%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.433.050.000)	(217.250.000)	559,63%
Aset Lainnya - Aset Rusak Berat	9.375.292.125	9.375.292.125	0,00%
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(4.658.957.585)	(4.658.957.585)	0,00%
Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	14.680.768	14.680.768	0,00%
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	(9.175.480)	(9.175.480)	0,00%
Jumlah Aset	**150.834.987.085**	**156.438.814.337**	**-3,58%**
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	18.770.665.060	-	100,00%
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
Jumlah Kewajiban	18.770.665.060	-	100,00%
Ekuitas			
Ekuitas - LO	(109.232.272.900)	156.438.814.337	-169,82%
R/K PPKD	241.296.594.925	-	100,00%
Jumlah Ekuitas	**132.064.322.025**	**156.438.814.337**	**-15,58%**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**150.834.987.085**	**156.438.814.337**	**-3,58%**

Sedangkan komposisi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp.)	%
Aset Lancar	45.043.182.637	29,86%
Aset Tetap	220.250.977.692	146,02%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(124.044.213.076)	-82,24%
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	6.296.250.004	4,17%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.433.050.000)	-0,95%
Aset Lainnya	9.389.972.893	10,17%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.668.133.065)	-3,09%
Jumlah Aset	**150.834.987.085**	**100,00%**

Aset Lancar
Rp. 45.043.182.637
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0

5.4.1 Aset Lancar

E.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GUP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal neraca. Rincian mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama periode Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut (dalam satuan Rupiah):

SKPD	SP2D LS	SPJ UP/GUP	JUKOR BKU	STS UP/GUP	SETOR LS	LRA
	1	2	3	4	5	6=(1+2)-(3+4+5)
Dinas Dukcapil	123.533.726.598	266.054.250	-	5.335.100	1.207.814	123.793.237.934
UPTIK	9.340.161.635	25.000.000	-	6.081.299	-	9.359.080.336
UPAK	626.230.053	36.652.800	-	-	-	662.882.853
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	15.586.415.735	65.010.300	-	22.496.800	2.099.295	15.626.829.940
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	18.147.002.010	94.248.381	-	31.442.200	-	18.209.808.191
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	22.911.270.941	454.353.150	-	-	-	23.365.624.091
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	24.145.397.974	339.872.576	-	16.313.291	-	24.468.957.259
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	24.589.092.204	50.000.000	-	21.511.348	10.519.818	24.607.061.038
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	1.126.107.174	44.929.145	7.754.945	18.160	-	1.163.263.214
JUMLAH	**240.005.404.324**	**1.376.120.602**	**7.754.945**	**103.198.198**	**13.826.927**	**241.256.744.856**

Jukor BKU adalah Jurnal Koreksi pada Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu		
1	5.2.2.01.01 - Belanja Alat Tulis Kantor	7.754.945
JUMLAH		**7.754.945**

Rincian Saldo Bank pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

SKPD	Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
Dinas Dukcapil	Bank DKI	118-02-04050-5	-	-
UPTIK	Bank DKI	118-02-04756-9	-	-
UPAK	Bank DKI	118-02-04761-5	-	-
Jakarta Pusat	Bank DKI	111-02-06594-2	-	-
Jakarta Utara	Bank DKI	201-02-10670-2	-	-
Jakarta Barat	Bank DKI	300-02-02423-2	-	-
Jakarta Selatan	Bank DKI	404-02-00026-0	-	-
Jakarta Timur	Bank DKI	503-02-00191-4	-	-
Kepulauan Seribu	Bank DKI	300-02-03608-7	-	-

Persediaan
Rp. 44.813.569.740

E.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp. 44.813.569.740** dan **Rp. 41.277.568.001**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

SKPD	Persediaan per 31 Desember 2020 (Rp.)	Persediaan per 31 Desember 2019 (Rp.)
Dinas Dukcapil	6.873.608.998	34.088.064.579
UPTIK	598.844.703	584.162.343
UPAK	63.391.750	73.752.300
Jakarta Pusat	4.831.333.956	1.850.695.616
Jakarta Utara	5.805.468.537	1.029.905.303
Jakarta Barat	8.778.761.084	1.484.156.443
Jakarta Selatan	7.932.335.193	1.091.703.688
Jakarta Timur	9.651.225.123	919.449.230
Kepulauan Seribu	278.600.396	155.678.499
Jumlah Persediaan	**44.813.569.740**	**41.277.568.001**

Persediaan Yang Tidak Digunakan (Usang/Rusak Berat) pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 14.895.351.398**. Nilai Persediaan yang telah usang ataupun rusak berat tidak disajikan di Neraca, melainkan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian Persediaan Usang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

SKPD	Persediaan Usang (Rp.)
Dinas Dukcapil	13.719.046.806
UPTIK	-
UPAK	38.997.475
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	121.671.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	232.253.430
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	397.237.500
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	226.509.965
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	147.267.230
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	12.367.992
Jumlah Persediaan Usang	**14.895.351.398**

Rincian Saldo Persediaan (kondisi baik) menurut Jenis Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2020 (Rp.)	Persediaan Bahan/Material per 31 Desember 2020	Persediaan Barang Lainnya per 31 Desember 2020 (Rp.)
Dinas Dukcapil	4.367.705.372	48.416.500	2.457.487.126
UPTIK	88.906.275	505.982.828	3.955.600
UPAK	63.391.750	-	-
Jakarta Pusat	38.511.300	-	4.792.822.656
Jakarta Utara	5.599.781.066	-	205.687.471
Jakarta Barat	8.410.544.719	-	368.216.365
Jakarta Selatan	7.690.534.050	10.014.200	231.786.943
Jakarta Timur	9.050.156.581	-	601.068.542
Kepulauan Seribu	278.600.396	-	-
Jumlah Persediaan	**35.588.131.509**	**564.413.528**	**8.661.024.703**

Aset Tetap
Rp. 96.206.764.616

5.4.2 Aset Tetap

Secara umum, Rincian Mutasi Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama periode Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp.)	Penambahan TA 2020 (Rp.)	Pengurangan TA 2020 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
Tanah	65.349.077.000	-	-	65.349.077.000
Peralatan dan Mesin	126.264.880.754	6.634.710.162	6.186.757.580	126.712.833.336
Gedung dan Bangunan	28.175.982.306	-	-	28.175.982.306
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	62.553.050	-	49.468.000	13.085.050
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(86.067.445.611)	(13.984.585.291)	(73.941.082)	(99.978.089.820)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23.381.784.247)	(684.339.009)	-	(24.066.123.256)
Akumulasi Penyusutan Lainnya	(46.938.000)	-	(46.938.000)	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**(109.496.167.858)**	**(14.668.924.300)**	**(120.879.082)**	**(124.044.213.076)**
Jumlah Aset Tetap	**110.356.325.252**	**(8.034.214.138)**	**6.115.346.498**	**96.206.764.616**

Tanah

Rp. 65.349.077.000

E.3 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 65.349.077.000**. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD	Luas	Lokasi	Nilai (Rp.)
Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta	2.376 m^2	Jalan Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat	36.436.240.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Utara	1.075 m^2	Jalan Berdikari No.2 Jakarta Utara	1.851.150.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat	3.567 m^2	Jalan Meruya Utara No. 5 Jakarta Barat	6.634.620.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Selatan	1.083 m^2	Jalan Radio V No. 6 Jakarta Selatan	16.666.017.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Timur	715 m^2	Jalan Cipinang Baru Raya No. 16 Jakarta Timur.	3.761.050.000
Jumlah Aset Tetap - Tanah			**65.349.077.000**

Adapun data kepemilikan aset tanah Dinas dan Sudin Dukcapil adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Akta Notaris No. 112 tanggal 23 Desember 1986 tentang Perdamaian/Dading
   - Fatwa Tanah untuk Ijin Bangunan Nomor 0805/F118/DJKT/88 tanggal 9 Juli 1988 dari Kepala Kantor Agraria Walikota Jakarta Barat.
   - Keputusan Gubernur Nomor 2961/IMB/1990 tentang Izin

Mendirikan Bangunan di Jl. Letjend S Parman Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

2. Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara

   Sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai No. 76 dengan tanggal Pembukuan 14 Februari 2019 dan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 24 Januari 2019 No. 24/HP/BPN-09.05/2019.

3. Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat

   - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 994/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Atas Bidang Tanah Seluas ± 3.540 M2 yang terletak di Komplek Makro Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Kota Madya Jakarta Barat untuk Pembangunan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.
   - Keputusan Gubernur Nomor 00046/IMB/2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Baru Meruya Utara.

4. Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan

   Sudah memiliki Sertifkat Hak Pakai No. 00409, dengan tanggal pembukuan 04 April 2019 dan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 25 Februari 2019 No. 39/HP/BPN-31.74/2019.

5. Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur

   Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 41/HP/BPN.31.75/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Tanah seluas 715 M2 terletak di Jalan Cipinang Baru Raya No. 16 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Peralatan dan Mesin
Rp. 126.712.833.336

E.4 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp. 126.712.833.336** dan **Rp. 126.264.880.754**. Mutasi pada Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Nilai Perolehan)	**126.264.880.754**
Mutasi Penambahan :	
Belanja Modal	6.205.176.604
Transfer Masuk dari SKPD Lain	380.065.554
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	49.468.000
Jumlah Mutasi Penambahan	**6.634.710.158**
Mutasi Pengurangan	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	61.265.000
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tidak Berwujud	6.079.000.004
Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan	28.479.000
Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	1.925.000
Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal)	16.088.572
Jumlah Mutasi Pengurangan	**6.186.757.576**
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Perolehan)	**126.712.833.336**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(99.978.089.820)
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Buku)	**26.734.743.516**

Transaksi mutasi penambahan pada Tahun Anggaran 2020 adalah berupa:

1. Belanja Modal sebesar **Rp. 6.205.176.604**
2. Transfer Masuk dari SKPD Lain **Rp. 380.065.554** Terdiri dari:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan(Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Pengirim
DINAS					
Sumersibel Pump	2015	1	10.340.000	10.340.000	Sudin Dukcapil Jakarta Barat
Pick Up	2013	1	318.800.554	318.800.554	Badan Pengelola Aset Daerah
Kursi Biasa / Karyawan	2004	50	472.500	23.625.000	Sudin Dukcapil Jakarta Barat
JUMLAH				**352.765.554**	
UPTIK					
Sepeda Motor	2013	2	13.650.000	27.300.000	Dinas Dukcapil
JUMLAH				**27.300.000**	
Jumlah Transfer Masuk Aset dari SKPD Lain per 31 Desember 2020				**380.065.554**	

3. Reklasifikasi antar Aset Tetap **Rp. 49.468.000** Terdiri dari:

SKPD	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (Rp.)
Dinas Dukcapil	2012	Treadmill	26.759.000
Dinas Dukcapil	2012	Eliptical Trainer	16.969.000
Dinas Dukcapil	2012	Meja Tening Meja	3.210.000
Dinas Dukcapil	2019	Permainan anak verupa perosotan tema kastil, jungkat jungkit, alas karpet evamatic	2.530.000
Jumlah Aset Tetap Lainnya			**49.468.000**

Transaksi mutasi pengurangan pada Tahun Anggaran 2020 adalah berupa:

1. Transfer Keluar ke SKPD Lain **Rp. 61.265.000** terdiri dari:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan(Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Penerima
DINAS					
Sepeda Motor	2013	2	13.650.000	27.300.000	UPTIK
JUMLAH				**27.300.000**	
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat					
Sumersibel Pump	2015	1	10.340.000	10.340.000	Dinas Dukcapil
Kursi Biasa / Karyawan	2004	50	472.500	23.625.000	Dinas Dukcapil
JUMLAH				**33.965.000**	
Jumlah Transfer Keluar Aset ke SKPD Lain per 31 Desember 2020				**61.265.000**	

2. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tidak Berwujud **Rp. 6.079.000.008**

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
UPTIK				
Licensi Oracle	2020	8	759.875.000,5	6.079.000.004
Jumlah Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Tidak Berwujud				**6.079.000.004**

3. Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan **Rp. 28.479.000**

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
UPTIK				
Sparepart Printer Fargo : RTD Kapton	2020	3	1.600.500	4.801.500
Sparepart Printer Fargo : Ethernet Board	2020	3	4.537.500	13.612.500
Sparepart Printer Fargo : Roller Heater	2020	5	2.013.000	10.065.000
Jumlah Reklasifikasi dari Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan				**28.479.000**

4. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan **Rp. 1.925.000**

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
UPTIK				
Kabel Power	2020	25	11.000	275.000
Film Fuser Sleeve Sparepart Printer HP M102	2020	10	165.000	1.650.000
Jumlah Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan				**1.925.000**

5. Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal) **Rp. 16.088.572**

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat				
Dynamic 330V	2011	4	560.120	2.240.480
Pro Link	2011	6	542.182	3.253.092
Kursi Rapat	2012	20	529.750	10.595.000
Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal)				**16.088.572**

Gedung dan Bangunan Rp. 28.175.982.306

E.5 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 28.175.982.306**. Mutasi pada Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Nilai Perolehan)	**28.175.982.306**
Jumlah Mutasi Penambahan	**-**
Jumlah Mutasi Pengurangan	**-**
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Perolehan)	**28.175.982.306**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(24.066.123.257)
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Buku)	**4.109.859.049**

Aset Tetap Lainnya Rp. 13.085.050

E.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah **Rp. 13.085.050**. Aset tetap tersebut berupa buku dan peralatan olahraga.

SKPD	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (Rp.)
Dinas Dukcapil	2008	Buku Umum Lain-lain	13.085.050
Jumlah Aset Tetap Lainnya			**13.085.050**

Saldo per buku Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Perolehan)	62.553.050
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(46.938.000)
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Buku)	15.615.050

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp. 124.044.213.076)

E.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing **(Rp. 124.044.213.076)** dan **(Rp. 109.496.167.858)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Nilai Buku s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)
Peralatan dan Mesin	126.712.833.336	(99.978.089.820)	26.734.743.516
Gedung dan Bangunan	28.175.982.306	(24.066.123.256)	4.109.859.050
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	13.085.050	-	13.085.050
Jumlah Aset Tetap	**154.901.900.692**	**(124.044.213.076)**	**30.857.687.616**

Aset Lainnya Rp. 9.585.039.832
Aset Tidak Berwujud Rp. 6.296.250.004

5.4.3 Aset Lainnya

E.8 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp. 6.296.250.004** dan **Rp. 217.250.000**. Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa aplikasi Sistem Operasi dan Database yang digunakan untuk menunjang pelayanan kependudukan.

Mutasi pada Aset Tidak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Nilai Perolehan)	**217.250.000**
Mutasi Penambahan :	
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tidak Berwujud	6.079.000.004
Jumlah Mutasi Penambahan	**6.079.000.004**
Jumlah Mutasi Pengurangan	**-**
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Perolehan)	**6.296.250.004**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(1.433.050.000)
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Buku)	**4.863.200.004**

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
UPTIK				
Licensi Oracle	2020	8	759.875.000,5	6.079.000.004
Jumlah Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan				**6.079.000.004**

Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp. 1.433.050.000)

E.9 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing **(Rp. 1.433.050.000)** dan **(Rp. 217.250.000)**. Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tidak berwujud yang dikurangi selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Amortisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Nilai Buku s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)
Licensi Oracle	6.296.250.004	(1.433.050.000)	4.863.200.004
Jumlah Aset Tidak Berwujud	**6.296.250.004**	**(1.433.050.000)**	**4.863.200.004**

Aset Rusak Berat Rp. 9.375.292.125

E.10 Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2020 adalah **Rp. 9.375.292.125**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Aset Rusak Berat per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD	Aset Rusak Berat (Rp.)
DINAS	1.720.632.070
UPTIK	876.796.302
UPDAK	2.723.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	439.393.106
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	2.330.063.001
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	1.456.093.924
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	1.378.237.334
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	983.271.336
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	188.082.052
Jumlah Aset Rusak Berat	**9.375.292.125**

Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA Rp. 14.680.768

E.11 Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA

Aset MPSA merupakan barang milik daerah yang tidak ditemukan dan diketahui fisiknya yang penyelesaiannya dilakukan melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian Barang Milik Daerah yang ditemukan dan diketahui fisiknya melalui Penghapusan Barang Milik daerah. Saldo Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2020 **Rp. 14.680.768** dan seluruhnya berada pada entitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Rincian Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Dinas Dukcapil				
Sepeda Motor	2014	1	14.680.768	14.680.768
Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA				**14.680.768**

Ektrakomtabel Rp. 1.083.891.497

E.12 Ekstrakomtabel

Ekstrakomtabel merupakan penatausahaan Barang Milik Negara yang dilakukan pada Barang Milik Negara dengan nilai di bawah nilai minimal kapitalisasi sehingga tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Neraca dan Laporan Tahunan tetapi tetap dicatat dalam kartu inventaris barang. Saldo Ekstrakomtabel per 31 Desember 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **Rp. 1.083.891.497**

sebagaimana terlampir pada KIB (Ekstrakomtabel).

Rincian ekstrakomtabel pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

SKPD	Persediaan Usang (Rp.)
Dinas Dukcapil	58.890.589
UPTIK	646.775.790
UPAK	519.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	98.359.272
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	83.019.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	154.637.846
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	-
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	41.690.000
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	-
Jumlah Persediaan Usang	**1.083.891.497**

Utang Belanja Pegawai Rp. 18.661.700.323

5.4.4 Kewajiban Jangka Pendek

E.13 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan. Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **Rp. 18.661.700.323**

Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Belanja Pegawai	Jumlah (Rp.)
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan April 2020	2.327.428.108
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan April 2020	23.017.500
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan Mei 2020	2.324.170.183
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan Mei 2020	21.296.250
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan Juni 2020	2.289.057.372
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan Juni 2020	37.833.750
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan Juli 2020	2.301.419.223
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan Juli 2020	19.743.750
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan Agustus 2020	2.313.071.466
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan Agustus 2020	19.743.750
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan September 2020	2.295.020.710
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan September 2020	36.045.000
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan Oktober 2020	2.286.356.704
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan Oktober 2020	39.262.500
Utang TKD / TPP PNS 25% Bulan November 2020	2.286.015.057
Utang TKD / TPP PNS PLT Bulan November 2020	39.262.500
Total Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2020 pada Listing	**18.658.743.823**
Total Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2020 pada Neraca	**18.661.700.323**
Lebih Catat pada Neraca	**2.956.500**

Utang Belanja Barang dan Jasa Rp. 108.964.737

E.14 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban yang timbul akibat transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan. Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **Rp. 108.964.737**.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD	Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020	Keterangan
Dinas	58.217.332	Tagihan TALI Bulan Desember 2020
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	11.490.590	Tagihan TALI Bulan Desember 2020
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	21.669.617	Tagihan TALI Bulan Desember 2020
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	17.587.198	Tagihan TALI Bulan Desember 2020
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020	**108.964.737**	

BAB VI: PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

Gambaran Umum

6.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Tugas Pokok dan Fungsi

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaksanaan Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan.
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.
6. Pelaksanaan dan pengendalian mobilitas penduduk.
7. Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan adminstrasi kependudukan.

8. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan.
9. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan.
10. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum.
11. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.
12. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil.
13. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
14. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
15. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
20. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Struktur Organisasi

6.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 85 TAHUN 2019
Tanggal 20 Mei 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

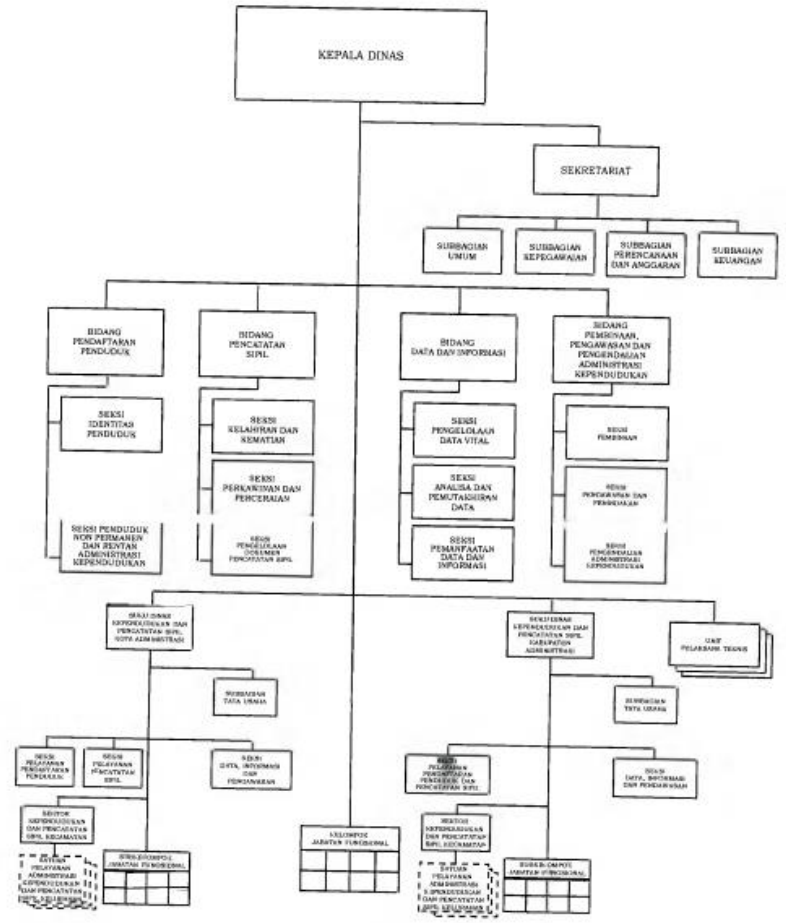

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama Pejabat
a	Kepala Dinas	Dhany Sukma, S.Sos, MAP
b	Sekretariat	Yadi Rusmayadi, AP, M.Si
	1. Subbagian Umum	Antupan Fajariana, SE
	2. Subbagian Kepegawaian	Anneke Iriany Fauzie, S.STP, M.Si
	3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran	Desmond, S.Si, MM
	4. Subbagian Keuangan	Vina Hasnawati, SE
c	Plt. Bidang Pendaftaran Penduduk	Alina Balqis, SH, MAP
	1. Seksi Identitas Penduduk	Herlina , SH, M.Si
	2. Seksi Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Agus Suryono, SP, M.Si
	3. Seksi Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Achmad Sopian, S.Kom
d	Bidang Pencatatan Sipil	Witri Yenny, S.Sos, M.Si
	1. Seksi Kelahiran dan Kematian	Fenry Sinurat, SH, M.Si
	2. Seksi Perkawinan dan Perceraian	Syahroni, S.Sos
	3. Plt. Seksi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Faqih Zuhri, SE
e	Bidang Data dan Informasi	Alina Balqis, SH, MAP
	1. Seksi Pengelolaan Data Vital	Eka Frentina Yulianti, ST, M.Si
	2. Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data	Dyah Soewartini Widji Lestari, SKM
	3.Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi	Ari Nur Ariffianto, S.Si
f	Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Drs. Akbal Syam CH, MAP
	1. Plt. Seksi Pembinaan	Myra Tiarany, S.Si
	2. Seksi Pengawasan dan Penindakan	Sudirman, SH
	3. Seksi Pengendaliaan Administrasi Kependudukan	Achmad Arief Santoso, SH, MM
g	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Yani Sahlijah, S.Sos, M.Si
	1.Kepala Subbagian Tata Usaha	Dian Pusptasari, SE, M.Si
	2. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pendaftaan Penduduk	Moris Pricahyadi, S.Kom
	2. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil	Heru Suprapto, S.Kom, M.TI
	3. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Dokumen Administrasi	Mia Mahayati, SE
h	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Gentina Arifin, S.Kom, M.TI
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Mario Aldino, S.Kom
	2. Kepala Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan	Condro Prabowo, S.Kom
	3. Kepala Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database	Raditya Wirawan, S.Kom
	4. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Pusat	Irpan Septian, S.Kom

No	Jabatan	Nama Pejabat
	5. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Utara dan Kep. Seribu	Tunjung Wibisono, S.Kom
	6. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Barat	Hega Purwa Pratama, S.Kom
	7. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Selatan	Amar Habibi, S.Kom
	8. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Timur	Djoko Wiranangapati, S.Kom
i	Plt. Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Pusat	Fredy Prasetya
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Syamsu Bachri, S.Sos, ME
	2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk	Evi Ryanne S, S.TP, MSE
	3.Plt.Kepala Seksi Pencatatan Sipil	Masnita, SH
	4. Kepala Seksi Data dan Informasi	Masnita, SH
j	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Utara	Muhammad Edward Idris, SE, MSE
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Nina Narulita Zainal, SH
	2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk	Yudi Hermawan, S.S, M.Si
	3. Kepala Seksi Pencatatan Sipil	Erlita Faskho
	4. Kepala Seksi Data dan Informasi	Rizky Parlindungan, ST
k	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat	Drs. Rosyik Muhamad, M.Si
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kuntarti, SE
	2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk	Milhati, S.Sos
	3. Kepala Seksi Pencatatan Sipil	Harapan Dalimunthe, SH
	4. Kepala Seksi Data dan Informasi	Dra. Budiyati, M.Si
l	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Selatan	Abdul Haris, SE, MAP
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Bintang Juara Suspita, S.Sos, Msi
	2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk	Joko Damaryanto, SH
	3. Kepala Seksi Pencatatan Sipil	Liana Manurung, S.Sos, MM
	4. Kepala Seksi Data dan Informasi	Ir. Popon Suryani
m	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Timur	Muhammad Nurrahman, S.Kom, MM
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Sutikno, S.Sos, MAP
	2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk	Pujiyanti, SH, M.Si
	3. Kepala Seksi Pencatatan Sipil	Melia M Djon, SH
	4. Kepala Seksi Data dan Informasi	Dra. Ika Julaika, M. Si
n	Plt. Kepala Suku Dinas Dukcapil Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Drs. Akbal Syam CH, MAP
	1. Plt.Kepala Subbagian Tata Usaha	Primita Wirdaningsih, SE
	2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Primita Wirdaningsih, SE
	3. Kepala Seksi Data dan Informasi dan Pengawasan	Drs. Joko Basuki Yuliantoro

BAB VII: PENUTUP

Laporan Keuangan Gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.